PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. KH. Wakhid Hasyim Nomor 5 Trenggalek Telepon (0355) 791121



Jurnal Ilmiah

KAJIAN PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN SECARA TERPADU DI KABUPATEN TRENGGALEK

2018

KAJIAN PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN SECARA TERPADU DI KABUPATEN TRENGGALEK

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRAK

Kajian pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) secara terpadu di Kabupaten Trenggalek ini dimaksudkan untuk mendukung keterkaitan pembangunan desa antarkawasan di Kabupaten Trenggalek. Rumusan masalah yang ingin dipecahkan adalah kriteria yang diperlukan dalam menentukan desa pusat pertumbuhan, cara menentukan desa pusat pertumbuhan, serta kondisi keterkaitan antardesa pusat pertumbuhan dan desa *hinterland*-nya. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan perumusan strategi pengembangan desa pusat pertumbuhan. Kajian ini menentukan tujuh macam kriteria sebagai bahan penentuan desa pusat pertumbuhan di Kabupaten Trenggalek, yaitu: sentralitas kawasan, aksesibilitas kawasan, hirarki pelayanan kawasan, indeks ketahanan ekonomi, rasio elektrifikasi, rencana pengembangan kawasan, dan potensi unggulan desa. Ketujuh kriteria penentuan DPP tersebut dianalisis dengan metode skalogram, analisis indeks sentralitas (hirarki pelayanan kawasan), analisis indeks ketahanan ekonomi (IKE), analisis rasio elektrifikasi, dan metode analisis kualitatif. Proses analisis tersebut menghasilkan penetapan DPP yang terdiri dari DPP utama, DPP alternatif I, dan DPP alternatif II di tiap kecamatan di Kabupaten Trenggalek. DPP utama memiliki kecenderungan sebagai desa pusat kecamatan yang memiliki karakteristik kawasan perkotaan. Sedangkan DPP alternatif lebih mengarah pada desa yang berada di luar kawasan perkotaan yang memiliki potensi untuk lebih berkembang di masa yang akan datang. Keterkaitan antar-DPP dan desa *hinterland*-nya dari hasil kajian ini dibedakan dalam dua macam bidang keterkaitan, yaitu keterkaitan spasial dan keterkaitan ekonomi. Hasil akhir dari kajian ini merumuskan arah strategi pengembangan DPP yang terbagi menjadi tiga karakteristik, yaitu: DPP wisata, DPP industri pengolahan/UMKM/makanan-minuman, dan DPP agro.

Kata kunci: desa pusat pertumbuhan, strategi pengembangan, kawasan

1. Pendahuluan

Pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa terlepas dari pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk di Indonesia tinggal di kawasan pedesaan dengan permasalahan utama berupa kemiskinan. Selain itu, kawasan pedesaan pada umumnya lokasinya jauh dari pusat kota yang dicirikan dengan keterbatasan infrastruktur ekonomi, minimnya kesempatan kerja di luar pertanian (*off-farm*), rendahnya produktivitas tenaga kerja pedesaan, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan serta aksesibilitas terhadap pasar yang rendah. (Yustika, 2015). Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan di Indonesia harus menempatkan kawasan pedesaan sebagai fokus dan target pembangunan. Apabila mayoritas penduduk pedesaan bisa melakukan mobilitas sosial ekonomi (pembangunan) maka bisa disimpulkan pembangunan di negara berkembang tersebut telah menjangkau sebagian besar warganya dan sebaliknya.

Dalam konteks pengembangan wilayah, terjadi ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan khususnya struktur produksi dan infrastruktur. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh pilihan strategi pembangunan yang terlalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi (Sumitro, 1994 dalam Multaali, 2003). Dampak yang diharapkan dari strategi tersebut yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang merata menjadi sulit terwujud. Hal ini dibuktikan dengan munculnya desa-desa tertinggal yaitu desa-desa yang perkembangannya masih sangat rendah dibandingkan dengan desa-desa lainnya.

Dalam upaya mengurangi ketimpangan wilayah di Indonesia maka berbagai kebijakan pembangunan telah dirumuskan diantaranya melalui strategi membangun kepadatan (menciptakan *economic of concentration*), strategi mengurangi jarak dengan membangun *connectivity* dan strategi penanganan kawasan kumuh dan berbagai persoalan yang menyertainya. Pada era Presiden Jokowi yang

tertuang dalam RPJMN 2015-2019, dicanangkan konsep kebijakan "membangun dari pinggiran" yang merupakan salah satu dari 9 agenda (Nawa Cita) yang ketiga yaitu: "*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan"*. Menurut Priyarsono (2016), konsep tersebut dapat ditafsirkan sebagai strategi meningkatkan intensitas kegiatan-kegiatan ekonomi terutama di daerah pedesaan untuk *menciptakan economies of concentration*, yakni penghematan yang timbul dari berkumpulnya kegiatan-kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Kebijakan ini dibarengi dengan upaya besar-besaran membangun infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan transportasi (jalan raya, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara).

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi wilayah sangat diperlukan pendekatan kewilayahan untuk mengurai ketimpangan antara kota dan desa. Upaya Presiden Jokowi melalui "membangun dari pinggiran"-nya harus dimaknai dengan penciptaan *economic of consentration* di kawasan pedesaan (baca: kabupaten). Pendekatan wilayah tersebut diwujudkan dalam pembentukan pusat-pusat pertumbuhan di desa yang diharapkan akan memacu pertumbuhan desa-desa di sekitarnya (Taylor, 1981 dalam Mutaali, 2003).

Kabupaten Trenggalek merupakan kawasan yang memiliki ciri-ciri sebagai kawasan pedesaan yaitu sebagian besar pola ruang merupakan kawasan non-terbangun dan sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang pertanian dalam arti luas. Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah 126.140 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa, dan 5 kelurahan.

Berbagai permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentunya tidak akan terselesaikan dengan efektif ketika kebijakan yang diambil masih bersifat sektoral dan tidak bersifat spasial (keruangan). Sebagaimana teori kutub pertumbuhan, bahwa perkembangan wilayah tidak terjadi di sembarang tempat tetapi berada pada lokasi-lokasi tertentu. Oleh karena itu melalui penetapan desa pusat pertumbuhan yang terpadu di Kabupaten Trenggalek diharapkan akan memacu perkembangan desa yang merata di seluruh wilayah dan mengurangi jumlah desa tertinggal. Pada tahun 2015 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Trenggalek sebesar 45 desa dan berkurang menjadi 24 desa pada tahun 2017.

Berdasarkan penjabaran tersebut, perlu diketahui desa-desa mana yang menjadi pusat pertumbuhan kawasan yang dapat dijadikan sasaran kebijakan Pemerintah Daerah agar perwujudan pembangunan yang merata berkesinambungan dapat segera terwujud.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pembangunan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Ada lima tujuan perencanaan pembangunan menurut UU 25/2004, yaitu:

1. Mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan.
2. Mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda (pusat maupun daerah).
3. Menghubungkan dan menyelarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Memanfaatkan sumber daya dengan baik.

2.2 Wilayah dan Kawasan

Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan). Menurut Nia K. Pontoh (2008), wilayah secara umum merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan, dan perwujudan fisik-geografis. Bintarto dan Hadisumarno (1982) menyatakan bahwa secara umum wilayah dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah disekitarnya. Menurut

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut Undang-undang No. 26 pada tahun 2007 mendefinisikannya sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

2.3 Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian lain, pembangunan kawasan perdesaan diartikan sebagai perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Wilayah perdesaan pada umumnya masih diasosiasikan sebagai daerah yang berlokasi di daerah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan, dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat.

2.4 Kutub dan Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi atau memberikan imbas terhadap kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Melalui pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ini, diharapkan terjadi proses interaksi dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Pengembangan kawasan-kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan memiliki skala perkembangan wilayah (*regional development*) yang berbeda-beda. Ada yang berskala nasional, seperti pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia tetapi ada pula yang berskala regional hinggal lokal.

Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Poles Theory*) sering pula dinamakan sebagai Teori Pusat-Pusat Pertumbuhan (*Growth Centres Theory*). Teori ini kali pertama dikembangkan oleh Perroux sekitar tahun 1955. Ia melakukan pengamatan terhadap proses-proses pembangunan. Menurut Perroux, pada kenyataannya proses pembangunan di mana pun adanya bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu sama lain. Tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan ini disebut sebagai pusat atau kutub pertumbuhan. Dari wilayah kutub pertumbuhan ini, proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Dengan kata lain, kutub pertumbuhan dapat memberikan imbas (*trickling down effect*) bagi wilayah atau daerah di sekitarnya.

Pada prinsipnya, konsep pusat pertumbuhan dilandasi oleh Konsep ruang ekonomi '*Economic Space*' yang dikemukkan oleh Francois Perroux pada tahun 1950. Menurut Perrox, pertumbuhan akan terjadi pada kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berbeda-beda dan perkembangan yang terjadi akan menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dengan efek yang beragam pula terhadap keseluruhan perekonomian (Misra, 1975).

Menurut Myrdall, 1957 (dalam Muta'ali, 2003), pertumbuhan ekonomi (baca: pembangunan) dalam suatu wilayah tertentu bergantung pada lokasi dari berbagai sumber daya alam dan berbagai keuntungan lokasi lainnya. Pertumbuhan ini selanjutnya akan menyebar pada daerah belakangnya melalui efek kumulatif, yaitu efek sebar (*spread effect*) dan efek serap (*backwash effect*). Prinsip pertumbuhan ekonomi wilayah ditentukan oleh adanya industri propulsif tertentu, cenderung hanya akan menarik modal dari daerah

sekitarnya, karena keuntungan lokasi pada wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan *backwash effect* akan menjadi lebih kuat dari *spread effect* yang ditandai dengan adanya penyerapan ekonomi wilaah sekitarnya ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebut. Apabila tidak ada kebijakan intervensi dari suatu mekanisme pasar maka pertumbuhan ekonomi ini akan menimbulkan pertumbuhan wilayah yang timpang (*regional inequality*). Hal senada dikemukakan oleh Hirschman, 1958 (dalam Muta'ali, 2003), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh pada daerah belakangnya melalui efek polarisasi (*polarization effect*) dan efek penetesan ke bawah (*trickling down effect*). *Polarization effect* tersebut diperkuat dengan adanya pemusatan investasi pada pusat pertumbuhan, sedangkan *trickling down effect* dapat tumbuh dengan cara meningkatkan daya tarik wilayah sekitarnya. Perbedaan antara konsep Myrdal dan Hirschman adalah terletak pada keyakinan masing-masing akan terjadinya *'spread effect'* atau '*trickling down effect'* dengan adanya kutub pertumbuhan tersebut. Menurut Myrdal, *backwash effect* akan muncul lebih kuat daripada *'spread effect'*, sedangkan menurut Hirschman, *trickling down effect* akan lebih kuat daripada *polarization effect* yang berarti bagi daerah belakang, dampak positif lebih banyak.

Boudeville (dalam Muta'ali, 2003), menyatakan bahwa setiap wilayah mempunyai perbedaan struktur ekonomi maka ia mengusulkan perlu dilakukan pemilihan lokasi pusat atau kutub pertumbuhan yang dapat mendorong efek kumulatif kegiatan ekonomi dan menyebarkannya ke daerah belakangnya.

Friedmann, 1979 (dalam Muta'ali, 2003), menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses integrasi sosial dan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya berbagai inovasi pada daerah inti (*core area*) yang kemudian menyebar pada daerah belakangnya (*periphery*). Pertumbuhan tersebut terjadi secara kumulatif dalam lingkup sosial dari kota-kota atau wilayah-wilayah, dimana terdapat berbagai kemudahan dalam sistem komunikasi dan informasi, kemampuan memecahkan suatu masalah sosial dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan konsep pusat atau kutub pertumbuhan wilayah maka suatu area (wilayah) akan menjadi pusat pertumbuhan jika memenuhi persyaratan antara lain keuntungan lokasi (*location advantages*), ketersediaan sumber daya, dan adanya kegiatan atau industri pendorong (*propulsive industry*). Konsep tersebut dapat dijadikan bahan rumusan indikator-indikator desa pusat pertumbuhan, yaitu aksesibilitas lokasi dan pusat pelayanan, yang merupakan operasionalisasi konsep *location advantages.* Sedangkan aspek sumber daya dan *propulsive industry* diwujudkan dalam penentuan sektor basis pengembangan.

3. Metode Penelitian

Suatu area (wilayah) akan menjadi pusat pertumbuhan jika memenuhi persyaratan antara lain keuntungan lokasi (*location advantages*), ketersediaan sumber daya, dan adanya kegiatan atau industri pendorong (*propulsive industry*). Konsep tersebut dapat dijadikan bahan rumusan indikator-indikator dalam penentuan desa pusat pertumbuhan, yaitu aksesibilitas lokasi dan pusat pelayanan, yang merupakan operasionalisasi konsep *location advantages.* Sedangkan aspek sumber daya dan *propulsive industry* diwujudkan dalam penentuan sektor basis pengembangan.

Dengan gambaran indikator penentu dalam penetapan desa pusat pertumbuhan berdasarkan simpulan teori tersebut, dalam kajian ini pun akan ditetapkan indikator penentu desa pusat pertumbuhan yang terdiri dari kriteria aksesibilitas lokasi, hirarki pusat pelayanan, dan aspek sumber daya. Kriteria-kriteria dasar tersebut menjadi dasar kriteria penentuan DPP dalam kajian ini yang lebih dijabarkan lagi menjadi kriteria sentralitas kawasan, aksesibilitas kawasan, hirarki pelayanan kawasan, indeks ketahanan ekonomi, dan rasio elektrifikasi. Penjabaran ini dilakukan untuk mengantisipasi kesulitan penggalian data bidang sektor basis pengembangan yang perlu dianalisis dengan metode LQ. Selain itu, diperlukan data pendukung dalam bidang rencana pengembangan kawasan skala kabupaten yang ada di tiap-tiap desa serta potensi unggulan yang dimiliki oleh

tiap desa di Kabupaten Trenggalek yang menjadi subyek kajian ini.

Kriteria penentuan DPP tersebut akan dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan beberapa jenis metode analisis. Metode analisis data kuantitatif yaitu berupa analisis sentralitas kawasan, analisis skalogram, analisis hirarki pelayanan kawasan, analisis indeks ketahanan ekonomi (IKE), dan analisis rasio elektrifikasi. Sedangkan untuk data kualitatif dianalisis dengan menggunakan beberapa jenis metode analisis kualitatif yang sesuai.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Kriteria Penentuan DPP

Dalam menentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) Kabupaten Trenggalek ini dirumuskan melalui beberapa kriteria, yaitu sentralitas kawasan, aksesibilitas kawasan, hirarki pelayanan, indeks ketahanan ekonomi, dan rasio elektrifikasi. Variabel-variabel dalam kriteria tersebut dianalisis dengan menggunakan metode teknik skalogram maupun indeks sentralitas. Desa yang memiliki nilai akhir tertinggi merupakan desa yang berpotensi menjadi Desa Pusat Pertumbuhan. Dalam kajian penentuan DPP ini, dilakukan dua alternatif DPP, yaitu tanpa disertai dengan kriteria rencana pengembangan kawasan ke depan dan dengan menambahkan kriteria rencana pengembangan kawasan ke depan sebagai salah satu variabel penentu DPP. Kriteria rencana ke depan tersebut terdiri dari variabel rencana keberadaan JLS, rencana pelabuhan, dan rencana bendungan. Variabel tersebut juga akan dianalisis dengan menggunakan teknik skalogram.

Tabel Kriteria Penentuan DPP Di Kabupaten Trenggalek

No	Kriteria	Variabel
1.	Sentralitas Kawasan	1. Jarak desa terhadap pusat kecamatan 2. Jarak desa terhadap pusat kabupaten
2.	Aksesibilitas Kawasan	1. Akses moda transportasi (akses thd angkutan umum) 2. Keterbukaan wilayah (jalan utama desa bisa diakses kendaraan roda 4) 3. Kualitas jalan (kondisi/jenis perkerasan) 4. Kelas jalan utama desa
3.	Hirarki Pelayanan	1. Jumlah fasilitas pendidikan 2. Jumlah fasilitas kesehatan
4.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Merupakan hasil skor dari bidang-bidang berikut: 1. Keragaman produksi desa 2. Pertokoan 3. Pasar 4. Toko/warung kelontong 5. Kedai dan penginapan 6. Pos dan logistik 7. Bank dan BPR 8. Akses terhadap kredit 9. Lembaga ekonomi lain 10. Aksesibilitas kawasan
5.	Rasio Elektrifikasi	Merupakan total KK berlistrik dibandingkan dengan total KK keseluruhan di tiap desa
6.	Rencana Pengembangan Kawasan Skala Kabupaten	Merupakan desa yang menjadi sasaran lokasi rencana skala kabupaten yang berupa: 1. Rencana JLS 2. Rencana Pelabuhan 3. Rencana Bendungan
7.	Potensi Unggulan Desa	Merupakan potensi unggulan kabupaten yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, khususnya bidang: 1. Potensi kewilayahan 2. Potensi pariwisata 3. Potensi komoditas 4. Potensi aktivitas dan produk (perdagangan, industri, dll.)

Sumber: Hasil Kajian, 2018

4.2 Penetapan DPP

Dalam penetapan Desa Pusat Pertumbuhan, dirumuskan asumsi bahwa satu kecamatan terdapat satu DPP utama dan didukung oleh dua DPP alternatif yang merupakan desa-desa dengan nilai tertinggi. DPP alternatif kedua jika secara spasial tidak berhimpit dengan DPP utama maupun DPP alternatif pertama dapat digunakan sebagai pemecah konsentrasi pembangunan, khususnya untuk kecamatan-kecamatan yang memiliki wilayah yang cukup luas. Dalam bab analisis telah dijelaskan bahwa didapatkan hasil analisis penetapan DPP di Kabupaten Trenggalek ini dalam 2 versi, yaitu sebelum penambahan

variabel rencana (DPP versi 1) dan setelah penambahan variabel rencana (DPP versi2). Variabel rencana yang dimaksud adalah rencana pengembangan kawasan skala kabupaten yang terdapat di beberapa desa di Kabupaten Trenggalek. Rencana pengembangan kawasan tersebut berupa rencana JLS, pelabuhan, dan bendungan. Selain itu, variabel rencana yang dimaksud juga mempertimbangkan terkait keberadaan potensi unggulan desa yang cukup diperhitungkan dalam skala kabupaten. Potensi unggulan desa tersebut meliputi berbagai bidang, khususnya ekonomi, yang berupa potensi kewilayahan, pariwisata, komoditas, maupun aktivitas dan produk hasil pengolahan.

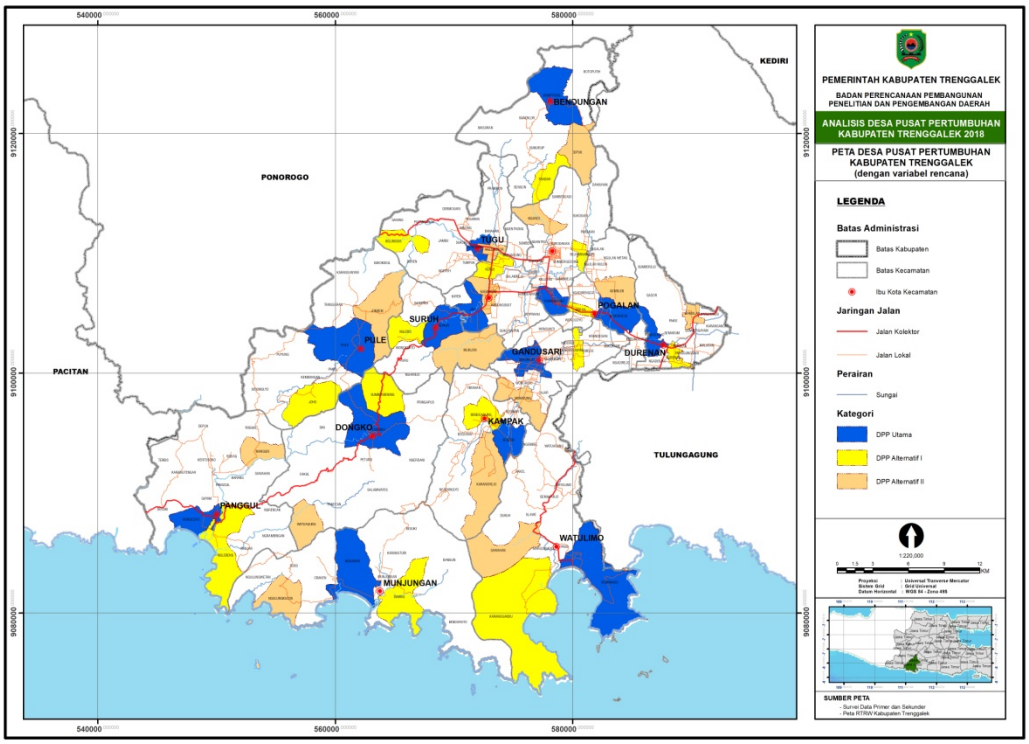
Dengan adanya penambahan variabel yang dianggap penting dalam perkembangan kawasan di masa yang akan datang, dari hasil kesepakatan tim pembahas kajian ini dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan, ditetapkan bahwa DPP yang diputuskan menjadi hasil akhir dari kajian ini adalah DPP versi 2 yang turut mempertimbangkan variabel rencana dan potensi unggulan desa. DPP dengan penambahan variabel rencana serta potensi unggulan desa ditetapkan berupa 3 DPP, yaitu DPP Utama, DPP Alternatif I, dan DPP Alternatif II yang merupakan desa-desa dengan nilai hasil *scoring* tertinggi dengan mempertimbangkan potensi unggulan yang dimiliki oleh tiap-tiap desa tersebut.

Tabel Hasil Penetapan DPP Kabupaten Trenggalek 2018

No	Kecamatan	Klasifikasi		
		DPP Utama	**DPP Alternatif I**	**DPP Alternatif II**
1	Panggul	Wonocoyo	Nglebeng	Manggis
2	Munjungan	Masaran	Tawing	Ngulungkulon
3	Watulimo	Tasikmadu	Karanggandu	Sawahan
4	Kampak	Senden	Bendoagung	Karangrejo
5	Dongko	Dongko	Sumberbening	Watuagung
6	Pule	Pule	Joho	Jombok
7	Karangan	Jati	Kerjo	Karangan
8	Suruh	Suruh	Nglebo	Mlinjon
9	Gandusari	Sukorejo	Karanganyar	Ngrayung
10	Durenan	Kendalrejo	Durenan	Kamulan
11	Pogalan	Bendorejo	Ngetal	Gembleb
12	Trenggalek	Karangsoko	Rejowinangun	Ngares
13	Tugu	Gondang	Nglinggis	Nglongsor
14	Bendungan	Dompyong	Srabah	Depok

Sumber: Hasil Kajian, 2018

Hasil penetapan DPP tersebut jika dilihat secara spasial akan menghasilkan peta sebagaimana berikut.



Peta Sebaran DPP Kab. Trenggalek 2018

4.3 Keterkaitan antar-DPP dan Desa Hinterland-*nya*

Keterkaitan antar-DPP dan desa *hinterland*-nya dapat dibedakan dalam dua macam bidang keterkaitan, yaitu keterkaitan spasial dan keterkaitan ekonomi.

Keterkaitan antar-DPP di Kabupaten Trenggalek pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi jaringan jalan yang telah terbentuk. Jaringan jalan yang telah terbentuk menggambarkan keterkaitan antar-wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan utama kabupaten maupun jalan lokal antar-kecamatan di tiap DPP tersebut berada. Seluruh DPP berkaitan dengan DPP lain di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa DPP memiliki keterkaitan terbatas dengan DPP sekitarnya, misal DPP di Kecamatan Bendungan dan Munjungan.

Keterkaitan spasial ini tidak terbatas dalam lingkup batas administrasi. Dimungkinkan adanya suatu DPP di suatu kecamatan tertentu memiliki keterkaitan spasial dengan desa di luar kecamatan tersebut. Kondisi ini sangat dipengaruhi dengan kesamaan aktivitas kawasan maupun kondisi sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan tersebut. Demikian juga untuk konsep keterkaitan antara DPP dengan desa *hinterland*-nya.

Sektor bidang ekonomi merupakan salah satu faktor penentu utama dalam suatu perkembangan kawasan. Berdasarkan hasil kajian Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek, terdapat beberapa produk unggulan daerah yang telah disepakati, yaitu coklat, kopi dan susu, olahan ikan, minyak atsiri, dan kelapa.

Kondisi keterkaitan ekonomi sesuai dengan gambaran kondisi keterkaitan spasial sebagaimana digambarkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan keterkaitan ekonomi turut berkembang dengan adanya dukungan secara spasial kawasan.

4.4 Arah Strategi Pengembangan DPP secara Terpadu Di Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan hasil wawancara mendetail dengan pihak terkait, *focus grup discussion*, serta peninjauan terhadap hasil kajian-kajian terdahulu, terdapat kecenderungan arah pengembangan kawasan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan potensi yang dimiliki. Arah pengembangan kawasan di tiap-tiap DPP di tiap kecamatan di Kabupaten Trenggalek memiliki kecenderungan karakteristik yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu: DPP wisata, DPP industri pengolahan/UMKM/Makanan-minuman, dan DPP agro dalam artian luas. Ketiga kecenderungan tersebut dirumuskan berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki oleh tiap-tiap kawasan di tiap kecamatan. Potensi unggulan tersebut merupakan potensi-potensi yang cukup memberikan pengaruh terhadap Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan. Detail DPP berdasarkan kecenderungan arah pengembangan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel Potensi Arah Pengembangan DPP Tiap Kecamatan Di Kabupaten Trenggalek 2018

NO	KARAKTERISTIK DPP	LOKASI DPP	KETERANGAN
1	Wisata	1 Panggul	Wisata, kelapa
		2 Munjungan	Wisata pantai
		3 Watulimo	Wisata, pelabuhan
		4 Karangan	Wisata religi
		5 Tugu	Wisata minat khusus
		6 Bendungan	Wisata, susu-kopi
2	Industri Pengolahan / UMKM/ Makanan-minuman	1 Kampak	Camilan, wisata
		2 Suruh	Susu kambing etawa
		3 Gandusari	Genteng, wisata
		4 Durenan	Camilan, genteng
		5 Pogalan	Bakpia
		6 Trenggalek	Camilan/kuliner
3	Agro	1 Dongko	Atsiri, seni
		2 Pule	Agro

Sumber: Hasil Kajian, 2018

Detail penggalian potensi arah pengembangan tersebut dapat menjadi arah pengembangan yang difokuskan di DPP tiap kecamatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari potensi arah pengembangan tiap kecamatan tersebut dapat dijadikan arah pengembangan tiap DPP yang ada di tiap kecamatan, baik DPP Utama, DPP Alternatif I, maupun DPP Alternatif II. Arah pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi fokus pengembangan kawasan di tiap-tiap DPP agar lebih efektif dan efisien.

Strategi pengembangan DPP dirumuskan secara tipikal sesuai dengan karakteristik DPP

yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategi ini didapatkan dari hasil analisis situasi dan kondisi tiap bidang karakteristik di Kabupaten Trenggalek secara umum. Berikut adalah rumusan strategi pengembangan DPP berdasarkan karakteristik DPP tersebut.

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil Kajian Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan secara Terpadu Di Kabupaten Trenggalek ini sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria yang diperlukan dalam menentukan desa pusat pertumbuhan adalah kondisi sentralitas kawasan, aksesibilitas, hirarki pelayanan umum, indeks ketahanan ekonomi, rasio elektrifikasi, rencana pengembangan kawasan di masa yang akan datang, serta potensi unggulan kawasan.
2. Cara menentukan desa pusat pertumbuhan adalah dengan teknik *scoring* dari tiap-tiap variabel di masing-masing kriteria yang diperlukan. Setelah didapatkan hasil *scoring*, dilakukan penetapan desa pusat pertumbuhan dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki oleh tiap-tiap desa yang dimungkinkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan kawasan di masa yang akan datang. DPP yang ditetapkan untuk Kabupaten Trenggalek berdasarkan hasil analisis dan pembahasan adalah DPP yang dihasilkan berdasarkan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, yaitu setelah adanya penambahan variabel rencana serta potensi unggulan.
3. Keterkaitan antardesa pusat pertumbuhan dan desa *hinterland*-nya dibedakan dalam dua bidang, yaitu keterkaitan spasial dan keterkaitan ekonomi. Keterkaitan spasial antarkawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi jaringan jalan yang ada. Sedangkan kondisi keterkaitan ekonomi dipegaruhi oleh jenis aktivitas ekonomi masyarakat antarsatu kawasan dengan kawasan lainnya, baik berupa DPP maupun desa *hinterland*-nya.
4. Arah strategi pengembangan dirumuskan dalam 3 karakteristik, sebagaimana berikut:

Tabel Strategi Pengembangan DPP Berdasarkan Karakteristik Tiap DPP Di Kabupaten Trenggalek

KARAKTERISTIK DPP	LOKASI DPP	STRATEGI PENGEMBANGAN DPP
Wisata	1 Panggul 2 Munjungan 3 Watulimo 4 Karangan 5 Tugu 6 Bendungan	a. Mengoptimumkan potensi wisata yang telah dimiliki oleh tiap DPP; b. Menguatkan kapasitas dan kemauan masyarakat dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki; c. Membentuk Desa Wisata unggulan di tiap DPP berdasarkan karakteristik lokal yang dimiliki; d. Menjadikan kawasan wisata sekaligus sebagai area pemasaran produk lokal unggulan kabupaten; e. Membentuk paket-paket wisata dengan karakteristik tertentu yang menghubungkan antarkawasan wisata; f. Membentuk sistem jaringan jalan utama kabupaten antara kawasan selatan (Panggul-Munjungan-Watulimo) dengan pusat kota Trenggalek tanpa melintasi kawasan luar Kabupaten Trenggalek untuk mengoptimumkan dampak perkembangan kawasan di dalam wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek sendiri.
Industri Pengolahan/UMKM/Makanan-minuman	1 Kampak 2 Suruh 3 Gandusari 4 Durenan 5 Pogalan 6 Trenggalek	a. Membentuk kawasan atraksi produk industri pengolahan/UMKM/makanan-minuman yang dimilliki oleh tiap DPP; b. Menghubungkan kawasan potensi industri pengolahan/UMKM/makanan-minuman dengan pusat Kabupaten Trenggalek (DPP Kecamatan Trenggalek) sebagai area display seluruh produk unggulan kabupaten; c. Menguatkan sistem jaringan jalan antarkawasan di dalam

KARAKTERISTIK DPP	LOKASI DPP	STRATEGI PENGEMBANGAN DPP
		kabupaten untuk meningkatkan mobilitas antarkawasan tersebut.
Agro	1 Dongko 2 Pule	a. Meningkatkan kualitas hasil komoditi agro unggulan kabupaten; b. Meningkatkan nilai tambah komoditi agro menjadi bahan olahan sejak dari area penghasilnya; c. Meningkatkan sistem jaringan jalan antarkawasan di dalam kabupaten untuk meningkatkan mobilitas antarkawasan tersebut.

Daftar Pustaka

Adisasmita, R. 2010. "*Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*". Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek. 2017. "*Kajian Strategi Pembangunan Desa*". Trenggalek: Bappedalitbang.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek. 2017. "*Roadmap Sistem Inovasi Daerah*". Trenggalek: Bappedalitbang.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek. 2018. "*Teori tentang Desa*". Trenggalek: Bappedalitbang.

Muta'ali, Luthfi. "*Studi Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Majalah Geografi Indonesia, Volume 17, Nomor 1, Maret 2003.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).

Priyarsono, D. S. "Memba*ngun dari Pinggiran: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional*". 2016. Web. September 2018.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Yustika, A. E. "*Ekonomi Kelembagaan, Paraadigma, Teori, dan Kebijakan*". 2015. Web. September 2018.